

NAPAS BARU INDONESIA

Catatan Kedaulatan, Kesejahteraan Rakyat, dan Kebanggaan Bangsa

Rangkuman Rekam Jejak dan Kebijakan Publik dalam Pemberitaan Media Massa Nasional (2024–2026)

Penyunting:
Tim Media Bamsoet

NAPAS BARU INDONESIA

Catatan Kedaulatan, Kesejahteraan Rakyat, dan Kebanggaan Bangsa

Rangkuman Rekam Jejak dan Kebijakan Publik
dalam Pemberitaan Media Massa Nasional (2024–2026)

Penyunting:
Tim Media Bamsoet

Penerbit:
Self Publishing Media
2026

Napas Baru Indonesia: Catatan Kedaulatan, Kesejahteraan Rakyat, dan Kebanggaan Bangsa

Penyunting: Tim Media Bamsoet
Penerbit: Self Publishing Media
Jakarta, Indonesia
Versi Digital Pertama, 20 Oktober 2026

Hak Cipta dan Lisensi Terbuka/*Open Access*

Buku ini diterbitkan di bawah lisensi publik non-komersial. Hak cipta naskah dan susunan narasi berada pada penulis/penyunting. Buku ini diterbitkan secara gratis dan disediakan sebagai dokumen publik. Anda diizinkan dan didorong penuh untuk mengunduh, menggandakan, menyebarkan, serta membagikan ulang seluruh atau sebagian isi buku ini kepada masyarakat luas, selama memenuhi ketentuan berikut:

Bukan untuk Tujuan Komersial: Buku ini atau bagian darinya tidak diperjualbelikan dalam bentuk apa pun untuk mengambil keuntungan finansial.

Atribusi: Tetap mencantumkan nama penulis/penyunting (Tim Media Bamsoet) dan judul asli buku dalam setiap bentuk pengutipan atau penyebaran ulang.

Integritas Karya: Tidak mengubah, memotong, atau mereduksi substansi isi dengan cara yang dapat menimbulkan penyimpangan makna atau penyesatan informasi.

DISCLAIMER

Buku ini disusun secara mandiri (*Self-Published/Non-ISBN*) sebagai bentuk dokumentasi, catatan kritis, dan rangkuman informasi publik mengenai capaian pembangunan serta dinamika kebijakan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data, angka, dan fakta yang disajikan dalam buku ini dihimpun dari berbagai sumber publik, pernyataan resmi instansi pemerintah, media massa terpercaya, serta dokumen laporan kinerja yang tersedia untuk umum hingga saat penulisan.

Penulis/penyuting dan penerbit telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keakuratan data pada saat buku ini

diterbitkan. Namun demikian, informasi dan angka dapat berkembang atau diperbarui seiring berjalannya waktu.

Buku ini ditujukan untuk edukasi, literasi publik, dan pembanding nalar kritis masyarakat, serta tidak dimaksudkan sebagai dokumen hukum resmi dari lembaga pemerintah tertentu.

Diterbitkan Secara Mendiri oleh:
Self Publishing Media
Email: selfpublishingedition@gmail.com
WhatsApp: +62-895382141678
Website: https://selfpublishing.biz.id
Tautan Unduh Gratis: *https://bukuonline.my.id*
Didistribusikan gratis dalam format digital untuk seluruh rakyat Indonesia.

PRAKATA

Setiap era dalam perjalanan sebuah bangsa selalu melahirkan ceritanya sendiri. Bagi Indonesia, masa transisi dan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan sebuah gelombang dinamika baru—sebuah gerak perubahan yang tidak hanya dapat diukur melalui angka-angka statistik, melainkan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Buku yang berada di tangan Anda ini, *Napas Baru Indonesia: Catatan Kedaulatan, Kesejahteraan Rakyat, dan Kebanggaan Bangsa,* lahir dari dorongan untuk merekam jejak-jejak perubahan tersebut. Saya sengaja menyusun narasi dalam buku ini secara mengalir dan menyatu, tanpa penyekatan bab yang kaku. Sebab, kami percaya bahwa setiap kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri. Kebijakan pangan, perbaikan gizi anak sekolah, perlindungan pekerja, hingga penguatan benteng kedaulatan di laut dan udara adalah jalinan benang yang saling melengkapi dalam merajut masa depan bangsa.

Di dalamnya, Anda akan menemukan potret transformasi yang menyentuh akar rumput: dari hadirnya makanan bergizi gratis bagi puluhan juta anak, pemuliaan status ratusan ribu guru honorer, hingga upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat. Di saat yang sama, buku ini juga mencatat langkah-langkah berani bangsa ini dalam menegakkan kedaulatan—melunasi beban krisis masa lalu, melangkah menuju kemandirian energi dan pangan, hingga mengukuhkan posisi Indonesia di panggung geopolitik dan olahraga internasional.

Buku ini diterbitkan secara mandiri (*self-published*) dan disediakan secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada batasan atau biaya untuk membaca, mengunduh, maupun menyebarluaskan karya ini. Harapan utama kami adalah agar catatan ringkas ini dapat menjadi bahan literasi publik, pemantik diskusi yang sehat, serta pengingat akan arah perjuangan bersama menuju Indonesia yang mandiri, adil, dan berdikari.

Selamat membaca.
Jakarta, 2026
Tim Media Bamsoet

PENDAHULUAN

Menatap Indonesia hari ini adalah menyaksikan sebuah tatanan yang sedang bergerak aktif menata fondasi masanya. Buku *Napas Baru Indonesia* hadir untuk merangkum dan menceritakan kembali rangkaian kebijakan, langkah strategis, serta pencapaian nyata yang menjadi tiang penyangga arah baru pembangunan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui narasi yang saling bertautan—tanpa sekat-sekat bab yang kaku—buku ini mengajak pembaca melintasi tiga pilar utama transformasi nasional:

1. Kesejahteraan Akar Rumput dan Pemuliaan Manusia

Perjalanan dimulai dari dapur rumah dan ruang-ruang kelas. Kehadiran negara diwujudkan secara langsung melalui jaring pengaman sosial yang menyentuh puluhan juta jiwa: mulai dari pemenuhan gizi 62 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan beras untuk 33 juta warga, perbaikan 400 ribu rumah rakyat, pembebasan biaya sekolah gratis di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga pemuliaan status 240 ribu guru honorer menjadi PPPK penuh waktu. Kesejahteraan ini diperkuat dengan perlindungan ekonomi pekerja—termasuk batas potongan ojol maksimal 8%, penahanan tarif BBM/listrik/gas, serta penyetaraan layanan BPJS Kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Kedaulatan Pangan, Energi, dan Kemandirian Ekonomi

Negara yang kuat adalah negara yang berdikari secara ekonomi. Buku ini memotret lompatan berani Indonesia dalam mewujudkan swasembada 8 komoditas pangan, menghentikan total impor solar, serta mencatatkan sejarah lewat ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV). Kemandirian ini disempurnakan oleh ketahanan finansial nasional yang berhasil melunasi beban utang krisis 1997–1998, memberikan kepastian hukum dan fiskal yang kokoh bagi generasi mendatang.

3. Benteng Pertahanan, Pelayanan Publik, dan Kebanggaan Bangsa

Transformasi di dalam negeri berkelindan erat dengan penguatan posisi Indonesia di panggung dunia. Kedaulatan wilayah

diperkokoh dengan hadirnya kapal induk pertama di ASEAN dan pembangunan ribuan infrastruktur dasar berupa jembatan serta sumber air di pelosok negeri. Di saat yang sama, efisiensi pelayanan publik dibuktikan dengan pemangkasan antrean haji dari 49 tahun menjadi 14 tahun. Seluruh pencapaian ini bermuara pada bangkitnya rasa bangga nasional (*national pride*), yang digelorakan oleh prestasi bersejarah Timnas di FIFA ASEAN Cup serta raihan 5 medali emas di Asian Games.

Napas Baru Indonesia bukanlah sekadar daftar angka atau laporan capaian kerja. Ini adalah cerita tentang bagaimana kedaulatan negara, kesejahteraan rakyat, dan kebanggaan sebagai satu bangsa dianyam menjadi satu kekuatan utuh untuk membawa Indonesia berdiri tegak dan disegani di mata dunia.

DAFTAR ISI

• Prakata/5
• Pendahuluan: Membaca Arah Transformasi Bangsa/7

BAGIAN I: MENJANGKAU MEJA MAKAN DAN RUANG KELAS
• Memenuhi Hak Dasar: Pemenuhan Gizi 62 Juta Anak Bangsa/10
• Menjaga Pangan Rakyat: Bantuan 30 KG Beras untuk 33 Juta Keluarga/12
• Meretas Asa Pendidikan: 182 Sekolah Rakyat dan 16 Sekolah Garuda/13
• Restorasi Ruang Belajar: Pembenahan 71 Ribu Sekolah di Seluruh Negeri/15
• Asa Tinggi Anak Bangsa: KIP Kuliah untuk 1 Juta Mahasiswa/16

BAGIAN II: MENGANGKAT HARKAT PENDIDIK DAN PEKERJA
• Pengakuan Nyata: Pengangkatan 240 Ribu Guru PPPK Tanpa Tes/19
• Kepastian Kesejahteraan: Pengambilalihan Gaji Guru Honorer oleh Pusat/20
• Keadilan Fiskal Pekerja: Pembebasan PPh 21 bagi Penghasilan Bawah 10 Juta/22
• Perlindungan Ekonomi Digital: Pembatasan Potongan Driver Online Maksimal 8%/23
• Jaring Pengaman Pekerja: Subsidi Upah Rp300 Ribu bagi 13,3 Juta Buruh/24

BAGIAN III: MEMBANGUN ATAP, KESEHATAN, DAN JARING SOSIAL
• Hunian Layak Bagi Rakyat: Perbaikan 400 Ribu Rumah dan Saluran 500 Ribu Genteng/26
• Kesetaraan Layanan Kesehatan: Kenaikan Anggaran BPJS Rp20 Triliun Tanpa Beda Kelas/28
• Deteksi Dini Kesehatan: 89 Juta Penerima Manfaat CKG/30
• Menjaga Daya Beli: Penahanan Harga BBM Subsidi, Listrik, dan Gas LPG 3 Kg/31

BAGIAN IV: BERDIKARI DI ATAS TANAH, ENERGI, DAN KEUNGAN SENDIRI
• Benteng Pangan Mandiri: Swasembada 8 Komoditas Pangan Utama/33
• Langkah Berani Transisi Energi: Stop Impor Solar dan Ekspor Perdana Baterai EV/35
• Merdeka dari Beban Masa Lalu: Pelunasan Utang Krisis 1997–1998/36

BAGIAN V: BENTENG KEDAULATAN DAN KEBANGGAAN BANGSA
• Menjaga Samudra Nusantara: Kehadiran Kapal Induk Pertama di ASEAN/39
• Nadir Pembangunan Daerah: 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air bagi Pelosok/41
• Reformasi Pelayanan Haji: Pemangkasan Antrean dari 49 Tahun Menjadi 14 Tahun/42
• Panggung Kehormatan Nusantara: Juara FIFA ASEAN Cup dan 5 Emas Asian Games/44
• *Penutup: Meneruskan Gelombang Perubahan/46*
• *Glosarium/47*
• *Daftar Pustaka/50*
• *Tentang Penyunting/53*

BAGIAN I:
MENJANGKAU MEJA MAKAN DAN RUANG KELAS

Pembangunan sebuah bangsa yang besar tidak pernah dimulai dari megahnya gedung-gedung pencakar langit atau megaproyek yang jauh dari sentuhan warga. Pembangunan yang sejati selalu berawal dari hal paling mendasar: apa yang tersaji di meja makan keluarga dan bagaimana masa depan dirajut di dalam ruang-ruang kelas.

Kesejahteraan bukan sekadar angka-angka dalam laporan makroekonomi, melainkan kepastian bahwa tidak ada anak Indonesia yang berangkat sekolah dengan perut kosong, dan tidak ada orang tua yang cemas memikirkan biaya pendidikan buah hatinya. Meja makan dan ruang kelas adalah dua titik temu di mana negara hadir secara nyata—merawat fisik generasi penerus sekaligus menempah pikiran mereka.

Melalui integrasi kebijakan sosial dan pendidikan, fokus pemerintah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan di akar rumput. Pemenuhan gizi anak-anak di sekolah serta bantuan pangan bagi puluhan juta keluarga menjadi fondasi fisik yang kokoh. Di atas fondasi itulah, akses pendidikan inklusif dibentangkan—mulai dari menghidupkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di pelosok negeri, merehabilitasi puluhan ribu ruang belajar yang rusak, hingga membukakan pintu perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Bagian ini mencatat bagaimana kebijakan publik dirancang bukan sekadar sebagai bantuan, melainkan sebagai investasi kemanusiaan yang menjangkau langsung ruang-ruang paling privat kehidupan rakyat Indonesia.

Memenuhi Hak Dasar:
Pemenuhan Gizi 62 Juta Anak Bangsa

Pembangunan generasi emas Indonesia tidak akan pernah terwujud selama masih ada anak-anak yang harus berjuang menahan lapar saat mendengarkan pelajaran di dalam kelas. Kesadaran mendasar inilah yang mendorong lahirnya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah program intervensi gizi nasional paling

berskala masif dalam sejarah modern Indonesia *(Detikcom, 27 Agustus 2026).*

Hingga pertengahan 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi di seluruh pelosok Nusantara *(InfoPublik, 20 Mei 2026).* Cakupan ini meliputi anak-anak sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program MBG tidak hanya sekadar membagikan porsi makanan siap santap, tetapi juga dirancang melalui standar gizi seimbang yang dikawal ketat oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan asupan protein, mikro-nutrisi, dan kalori yang cukup bagi tumbuh kembang anak *(Antara News, 22 April 2026).*



Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pelaksanaan dan antusiasme siswa dalam program Makan Bergizi Gratis. (Sumber Foto: Kantor Staf Presiden/KSP, 2025)

Di balik piring nasi dan lauk berporsi gizi tinggi yang dinikmati puluhan juta siswa setiap hari sekolah, terdapat roda ekonomi lokal yang berputar kencang. Program MBG dikelola melalui pembentukan ribuan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SP) di tingkat kecamatan dan desa. Dapur-dapur komunitas ini menyerap langsung bahan pangan dasar—seperti beras, telur, daging ayam,

sayur-mayur, hingga susu—dari para petani, peternak, dan pedagang pasar tradisional setempat *(Investortrust, 27 Agustus 2026)*. Dengan demikian, dana APBN yang dialokasikan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi ibu-ibu penggerak dapur serta menghidupkan ekosistem pertanian rakyat lokal.

Pemerintah menyadari bahwa menjalankan program berskala puluhan juta penerima bukanlah tanpa tantangan operasional. Evaluasi dan penyempurnaan rantai pasok dilakukan secara berkala demi menjamin keamanan pangan, ketepatan waktu distribusi, serta efisiensi anggaran negara *(Berita Nasional Update, 2 Oktober 2026)*. Kebijakan pemenuhan gizi ini telah menjadi fondasi paling krusial: menegaskan bahwa kesehatan dan ketercukupan gizi adalah hak dasar setiap anak Indonesia yang wajib dijamin oleh negara.

Menjaga Pangan Rakyat:
Bantuan 30 KG Beras untuk 33 Juta Keluarga

Di tengah tantangan cuaca ekstrem, ancaman kemarau panjang, serta dinamika harga pangan global, pemerintah mengambil langkah proaktif untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan rumah tangga rentan. Melalui perpanjangan program Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), negara hadir memberikan jaring pengaman sosial secara masif kepada lebih dari 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia *(Kompas.com, 2 Agustus 2026)*.

Skema bantuan ini dirancang dengan pengalokasian total 30 kilogram beras per keluarga untuk periode tiga bulan (Oktober hingga Desember 2026), di mana penyalurannya dilakukan sekaligus untuk memastikan efisiensi distribusi dan kecepatan dampak yang dirasakan masyarakat *(Kompas.tv, 9 Oktober 2026)*. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog mengoperasikan distribusi sekitar 996 ribu ton beras premium dan medium yang bersumber dari hasil penyerapan gabah petani lokal dan stok cadangan pemerintah *(Antara News, 7 Oktober 2026)*.



Aktivitas warga saat mengantre dalam penyerahan bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah di tingkat kelurahan. (Sumber Foto: CNBC Indonesia / Tri Susilo, 2026)

Bantuan beras 30 kg ini tidak sekadar menjadi bantuan logistik rutin, melainkan instrumen intervensi pasar yang krusial untuk menahan laju inflasi bahan pokok di tingkat akar rumput *(Antara News, 9 Juni 2026)*. Dengan terjaminnya pasokan beras utama bagi 33 juta keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam basis data sosial nasional, tekanan pengeluaran bulanan masyarakat dapat diredam secara signifikan.

Penyaluran beras bantuan ini difasilitasi melalui jaringan distribusi daerah, kantor pos, hingga ke tingkat desa dan kelurahan demi menjamin aksesibilitas wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) *(ANTARA News, 8 Oktober 2026)*. Melalui kepastian ketersediaan bahan pangan di setiap meja makan keluarga Indonesia, pemerintah memperkokoh fondasi stabilitas ekonomi masyarakat dari ancaman gejolak harga pangan dunia.

Meretas Asa Pendidikan:
182 Sekolah Rakyat dan 16 Sekolah Garuda

Pendidikan yang adil adalah pendidikan yang meruntuhkan tembok sekat sosial. Kehadiran program Sekolah Rakyat dan Sekolah

Garuda menjadi jawaban strategis pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem maupun talenta terbaik bangsa mendapatkan ruang tumbuh yang setara *(Detikcom, 11 Juli 2025)*.

Hingga 2026, sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan tersebar di berbagai pelosok daerah *(Kompas.com, 14 Mei 2026)*. Sekolah Rakyat didesain khusus sebagai sekolah berasrama (*boarding school*) gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Sebanyak 48 ribu siswa yang berlatar belakang dari keluarga tidak mampu telah diserap menjadi murid aktif. Negara menanggung seluruh fasilitas kehidupan mereka—mulai dari seragam, buku, tempat tinggal, hingga jaminan gizi harian—sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi orang tua *(Antara News, 18 Juni 2026)*.



Para siswa Sekolah Garuda berbaris rapi di halaman sekolah unggulan berbasis sains dan teknologi. (Sumber Foto: CNBC Indonesia / Tri Susilo, 2025)

Di sisi lain, untuk mencetak kepemimpinan masa depan dan menggembleng talenta sains, teknologi, serta keahlian strategis, pemerintah telah mengoperasikan 16 Sekolah Garuda *(CNN Indonesia, 8 Oktober 2025)*. Sekolah Garuda merupakan institusi pendidikan menengah unggulan nasional yang menerapkan kurikulum bertaraf internasional dan fasilitas laboratorium modern. Sekolah ini menyaring putra-putri terbaik dari seluruh penjuru

Nusantara tanpa memandang latar belakang sosial, demi mempersiapkan generasi pembangun sains dan industri masa depan. Integrasi antara 182 Sekolah Rakyat dan 16 Sekolah Garuda menjadi bukti nyata dari komitmen ganda pemerintah: di satu sisi menegakkan keadilan sosial di tingkat akar rumput, dan di sisi lain membangun benteng keunggulan intelektual bangsa di panggung global.

Restorasi Ruang Belajar:
Pembenahan 71 Ribu Sekolah di Seluruh Negeri

Kualitas proses belajar-mengajar tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan kompetensi guru, tetapi juga oleh kelayakan serta keamanan fisik gedung sekolah tempat para siswa menimba ilmu. Selama bertahun-tahun, persoalan atap bocor, dinding retak, hingga fasilitas sanitasi yang tidak memadai di berbagai sekolah daerah menjadi pemandangan yang memprihatinkan sekaligus menghambat potensi belajar anak-anak Indonesia *(Republika, 14 Februari 2026)*.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menggelontorkan program rehabilitasi infrastruktur pendidikan secara masif dengan target membenahi 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia sepanjang tahun anggaran 2026 *(Kompas.com, 18 Januari 2026)*. Langkah restorasi ini mencakup perbaikan ruang kelas rusak berat dan sedang, pembaruan atap serta pencahayaan, penyediaan fasilitas sanitasi sehat, hingga pembangunan laboratorium dan perpustakaan sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) *(Antara News, 3 Maret 2026)*.

Pelaksanaan restorasi ruang belajar ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian, antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum, dengan memanfaatkan mekanisme padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal di sekitar lingkungan sekolah *(Detikcom, 22 April 2026)*. Melalui pola perbaikan terpadu ini, sekolah-sekolah di pelosok Nusantara tidak hanya kembali berdiri kokoh dan aman, tetapi juga menghadirkan suasana belajar yang bermartabat serta memicu semangat belajar para siswa.



Proses pengerjaan perbaikan dan pembenahan fisik gedung sekolah dasar secara masif untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan layak. (Sumber Foto: Warta Nusantara/ Kementerian PUPR, 2026)

Restorasi 71 ribu gedung sekolah ini menegaskan bahwa keadilan sosial di bidang pendidikan harus diwujudkan secara fisik dan nyata. Negara memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang harus mempertaruhkan keselamatan jiwanya demi mengejar cita-cita di bawah atap sekolah yang lapuk.

Asa Tinggi Anak Bangsa:
KIP Kuliah untuk 1 Juta Mahasiswa

Pendidikan tinggi adalah jembatan utama mobilitas vertikal yang mampu memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Namun, bagi jutaan anak dari keluarga berpenghasilan rendah, impian untuk melangkah ke bangku kuliah sering kali terbentur oleh dinding tebal biaya pendidikan dan beban hidup harian *(Kompas.com, 12 Maret 2026)*.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan afirmatif yang signifikan dengan memperluas jangkauan dan alokasi anggaran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Anggaran KIP Kuliah dinaikkan secara drastis hingga mencapai Rp15,64 triliun *(Detikcom, 28 Mei 2026)*. Peningkatan anggaran ini memungkinkan kuota penerima manfaat melonjak hingga menyentuh 1 juta mahasiswa aktif yang tersebar di berbagai

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Nusantara *(Antara News, 15 Juli 2026).*



Penyerahan bantuan KIP Kuliah bagi mahasiswa penerima manfaat untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan merata. (Sumber Foto: Fraksi Gerindra / Media Center, 2025)

Program KIP Kuliah tidak hanya membebaskan seluruh biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/UKT) hingga lulus, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup bulanan yang disesuaikan dengan indeks harga daerah tempat mahasiswa menuntut ilmu *(InfoPublik, 10 Agustus 2026).* Kebijakan ini memastikan bahwa anak-anak berprestasi dari keluarga nelayan, petani, buruh, dan pekerja informal memiliki kesempatan yang sama untuk mengenakan jas almamater universitas terbaik.

Dukungan finansial yang inklusif ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mencetak sumber daya manusia berdaya saing tinggi. KIP Kuliah membukakan jalan bagi 1 juta anak bangsa untuk meraih gelar sarjana, membawa asa baru bagi keluarga mereka, serta siap menjadi pilar penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

BAGIAN II: MENGANGKAT HARKAT PENDIDIK DAN PEKERJA

Keagungan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan fisik atau ketersediaan fasilitas publik yang megah, melainkan dari sejauh mana negara memuliakan orang-orang yang membangun manusia dan menggerakkan roda ekonominya setiap hari. Pendidik dan pekerja adalah dua pilar utama penyangga keberlanjutan bangsa: yang satu menanamkan benih ilmu dan karakter, sementara yang lain memeras keringat demi menjaga denyut kehidupan ekonomi nasional.

Namun, selama bertahun-tahun, kedua kelompok ini kerap berhadapan dengan ketidakpastian. Para guru honorer harus mengajar dengan dedikasi penuh di tengah keterbatasan gaji yang jauh dari kata layak. Di saat yang sama, jutaan pekerja, buruh, dan pengemudi transportasi daring bertarung dengan tingginya beban hidup serta potongan pendapatan yang menggerus kesejahteraan keluarga mereka.

Bagian kedua ini merekam terobosan kebijakan yang secara fundamental mengangkat harkat dan martabat para pendidik serta pekerja Indonesia. Transformasi ini diawali dengan pengakuan atas pengabdian ratusan ribu guru honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu, diiringi kepastian pengambilalihan gaji pendidik oleh pemerintah pusat demi menjamin keadilan pendapatan di seluruh pelosok daerah.

Tidak berhenti di sektor pendidikan, komitmen keberpihakan negara juga diperluas ke ranah ketenagakerjaan dan ekonomi digital. Mulai dari keadilan fiskal melalui pembebasan PPh 21 bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah, pembatasan potongan aplikasi ojek online demi melindungi pendapatan pengemudi, hingga penyaluran subsidi upah bagi belasan juta buruh. Kebijakan-kebijakan ini dirangkai untuk satu tujuan mulia: memastikan bahwa mereka yang bekerja keras membangun negeri ini mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan yang selayaknya.

Pengakuan Nyata:
Pengangkatan 240 Ribu Guru PPPK Tanpa Tes

Guru adalah jiwa dari sistem pendidikan bangsa. Namun, selama bertahun-tahun, ratusan ribu guru honorer harus mengajar di ruang-ruang kelas dengan dedikasi tinggi di tengah bayang-bayang ketidakpastian status kerja dan penghasilan yang jauh di bawah standar layak *(Kompas, 14 November 2025).*

Menjawab nasib para pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun ini, pemerintah mengambil kebijakan terobosan dengan mengesahkan pengangkatan langsung secara bertahap bagi lebih dari 240 ribu guru honorer terdata menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui tes seleksi ulang yang rumit *(Detikcom, 18 Mei 2026).*

Prioritas pengangkatan ini diberikan kepada para tenaga pendidik kategori P1 serta guru honorer senior yang telah terverifikasi dalam basis data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta BKN *(Antara News, 3 September 2026).*



Momen kebahagiaan para guru honorer saat menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ASN PPPK sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka. (Sumber Foto: Dinas Pendidikan / Pemko Batam, 2022)

Kebijakan afirmasi tanpa tes ini tidak sekadar memberikan kepastian status kepegawaian resmi bagi 240 ribu guru, melainkan secara otomatis meningkatkan taraf hidup keluarga mereka melalui penerimaan gaji standar ASN beserta tunjangan melekat *(InfoPublik, 12 Juni 2026)*. Langkah ini memutus rantai diskriminasi kesejahteraan antara pendidik di sekolah negeri dan mengembalikan kehormatan profesi guru sebagai pilar pembentuk karakter generasi masa depan.

Melalui pengangkatan masif ini, negara menyampaikan pesan yang sangat jernih: tidak ada pengabdian tulus yang dilupakan. Pemerintah memastikan bahwa mereka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa mendapatkan pengakuan hukum, perlindungan kerja, serta kesejahteraan yang selayaknya.

Kepastian Kesejahteraan:
Pengambilalihan Gaji Guru Honorer oleh Pusat

Masalah klasik yang terus menghantui dunia pendidikan Indonesia adalah ketimpangan kemampuan keuangan daerah dalam membayar honorarium guru non-ASN. Di banyak daerah, guru honorer harus menerima gaji ratusan ribu rupiah per bulan yang kerap menunggak hingga berbulan-bulan, akibat keterbatasan APBD dan kerumitan birokrasi transfer daerah *(Kompas.com, 18 Oktober 2025)*.

Mengakhiri krisis kesejahteraan yang berkepanjangan ini, pemerintah mengambil keputusan fundamental dengan mengalihkan penganggaran serta pencairan tunjangan dan honorarium guru non-ASN langsung dari APBN Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen*) (Detikcom, 28 November 2024)*. Melalui mekanisme penyaluran langsung (*transfer account to account*), negara memastikan tunjangan profesi guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pendidik tanpa hambatan birokrasi daerah *(Liputan6.com, 2 Desember 2024)*.



Pemerintah mengalihkan dan menaikkan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan yang dikirimkan langsung oleh pusat. (Sumber Foto: Liputan6.com / Kemendikdasmen, 2024)

Kebijakan pengambilalihan dan simplifikasi aliran dana ini membawa tiga dampak krusial: menjamin ketepatan waktu pembayaran honorarium, menghilangkan risiko pemotongan tak berizin di tingkat lokal, serta menetapkan standar minimum penghasilan yang manusiawi bagi para pengajar di sekolah dasar dan menengah di seluruh pelosok negeri *(Antara News, 17 Oktober 2026)*.

Langkah tegas ini membuktikan bahwa negara hadir secara bertanggung jawab atas nasib para pembentuk karakter bangsa. Dengan kepastian finansial yang dijamin langsung oleh pemerintah pusat, para guru kini dapat memusatkan seluruh pikiran dan energi

mereka untuk mendidik tanpa harus terbeban oleh rasa cemas akan kelangsungan hidup harian.

Keadilan Fiskal Pekerja:
Pembebasan PPh 21 bagi Penghasilan Bawah 10 Juta

Tekanan ekonomi global dan dinamika inflasi harian kerap menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam struktur penerimaan negara, pekerja serta buruh kelas pekerja merupakan tulang punggung ekonomi yang paling rentan terdampak oleh pengurangan porsi pendapatan bersih (*take-home pay*) akibat potongan pajak rutin *(Bisnis.com, 15 Januari 2026)*.

Menjawab kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan reformasi insentif perpajakan yang progresif dan berkeadilan melalui perluasan skema Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) *(Kemenkeu RI, 10 Februari 2026)*. Melalui regulasi ini, seluruh pekerja, buruh industri, pegawai swasta, hingga tenaga kerja kontrak yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp10 juta per bulan dibebaskan secara penuh dari kewajiban pemotongan PPh 21 *(Kontan, 22 April 2026)*.



Kebijakan insentif fiskal PPh 21 diitanggung pemerintah. (Sumber Foto: IKPI / Kemenkeu RI, 2025)

Langkah pembebasan PPh 21 ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan pendapatan bersih bulanan bagi puluhan juta pekerja di sektor formal maupun *manufaktur (Antara News, 5 Mei 2026)*. Tambahan likuiditas tunai yang tersisa di kantong pekerja secara otomatis dialokasikan kembali untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, biaya pendidikan anak, serta konsumsi rumah tangga harian.

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem fiskal yang berkeadilan: negara tidak hanya fokus mengumpulkan penerimaan, tetapi juga secara aktif menyalurkan stimulus relaksasi pajak langsung ke dapur-dapur masyarakat pekerja untuk menjaga keberlanjutan daya beli nasional.

Perlindungan Ekonomi Digital:
Pembatasan Potongan Driver Online Maksimal 8%

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan jutaan profesi baru, salah satunya pengemudi transportasi daring (*ojek online* dan kurir logistik). Namun, di balik kemudahan akses layanan digital tersebut, para mitra pengemudi selama bertahun-tahun harus menanggung beban potongan komisi aplikasi yang sangat tinggi—mencapai 15% hingga 20% dari total tarif setiap transaksi *(Katadata, 20 Mei 2025)*. Tingginya potongan ini secara signifikan menggerus pendapatan bersih mitra yang bertaruh nyawa di jalan raya.

Menjawab aspirasi dan tuntutan keadilan dari jutaan pekerja gig di seluruh Indonesia, pemerintah mengeluarkan regulasi baru melalui Kementerian Perhubungan untuk merevisi batas maksimal potongan biaya sewa penggunaan aplikasi (*app fee*) menjadi paling tinggi 8% *(CNBC Indonesia, 4 Mei 2026)*. Kebijakan ini mewajibkan seluruh perusahaan aplikator transportasi digital untuk memangkas porsi komisi mereka demi memastikan manfaat ekonomi digital terdistribusi secara adil kepada para pengemudi *(Antara News, 18 Juni 2026)*.



Para pengemudi ojek online saat beraktivitas di jalan raya, kini mendapatkan kepastian pendapatan bersih lebih besar berkat pembatasan komisi aplikasi. (Sumber Foto: CNBC Indonesia / Tri Susilo, 2026)

Pemangkasan batas komisi dari 20% menjadi maksimal 8% ini memberikan dorongan pendapatan bersih (*take-home pay*) langsung sebesar 10% hingga 12% bagi para mitra pengemudi ojol dan kurir digital di seluruh Indonesia *(Tempo.co, 22 Juli 2026)*. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan regulasi ketat mengenai standar perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja lepas digital.

Langkah berani ini menegaskan bahwa modernisasi teknologi dan ekonomi digital tidak boleh tumbuh di atas keringat pekerja yang tidak dilindungi. Negara hadir untuk menata ulang ekosistem digital nasional agar menjadi lebih humanis, adil, dan memberikan keberlanjutan kesejahteraan bagi seluruh lini mitranya.

Jaring Pengaman Pekerja:
Subsidi Upah Rp300 Ribu bagi 13,3 Juta Buruh

Ketidakpastian situasi ekonomi global dan fluktuasi harga kebutuhan dasar kerap menempatkan kelompok pekerja serta buruh berpenghasilan rendah pada posisi yang rentan. Dalam menghadapi tekanan biaya hidup harian, bantalan sosial yang cepat dan tepat sasaran menjadi instrumen penting untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat kelas pekerja *(Kompas, 14 September 2026)*.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial nasional dengan total alokasi anggaran mencapai Rp8 triliun *(Bisnis.com, 28 September 2026)*. Program ini memberikan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja dan buruh terdaftar yang memiliki gaji di bawah batas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat *(Antara News, 5 Oktober 2026)*.



Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bantalan ekonomi langsung untuk menjaga daya beli 13,3 juta buruh dan pekerja. (Sumber Foto: Frekuensi News / Kementerian Ketenagakerjaan, 2026)

Penyaluran BSU dilakukan transparan melalui kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dana ditransfer langsung ke rekening pekerja melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) serta jaringan PT Pos Indonesia untuk menjangkau pekerja di daerah pelosok *(Kontan, 12 Oktober 2026)*.

Injeksi bantuan tunai ini tidak hanya memberikan kelonggaran finansial langsung bagi 13,3 juta keluarga buruh untuk memenuhi kebutuhan pangan dan rumah tangga, tetapi juga turut menjaga stabilitas konsumsi domestik di tingkat nasional. Melalui kehadiran BSU, negara mempertegas komitmennya untuk selalu berdiri sebagai pelindung dan penopang utama kesejahteraan para pekerja yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia.

BAGIAN III: MEMBANGUN ATAP, KESEHATAN, DAN JARING SOSIAL

Kesejahteraan sebuah masyarakat tidak hanya dinilai dari apa yang mereka konsumsi di meja makan atau pendapatan yang mereka bawa pulang setiap bulan. Kesejahteraan yang hakiki diukur dari kepastian bahwa setiap keluarga memiliki tempat berteduh yang aman dan layak, jaminan perlindungan kesehatan saat musibah sakit datang, serta benteng sosial yang menjaga mereka dari gejolak harga kebutuhan pokok.

Rumah, kesehatan, dan stabilitas harga adalah tiga pilar utama penopang harkat hidup manusia. Tanpa atap yang kokoh, keluarga kehilangan rasa aman. Tanpa akses kesehatan yang adil, kemiskinan baru dapat tercipta hanya karena biaya pengobatan. Dan tanpa intervensi harga bahan energi serta listrik, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akan tergerus oleh ketidakpastian pasar.

Bagian ketiga ini mencatat deretan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui program rehabilitasi ratusan ribu rumah tidak layak huni dan penyediaan material hunian berkualitas di kawasan permukiman. Di bidang kesehatan, negara merombak sistem jaminan sosial melalui peningkatan anggaran BPJS Kesehatan guna menghapus diskriminasi kualitas layanan, diiringi gerakan deteksi dini penyakit secara masif bagi puluhan juta warga.

Langkah-langkah tersebut disempurnakan dengan kebijakan penahanan harga BBM subsidi, listrik, dan LPG 3 KG demi menjaga daya beli rakyat tetap stabil. Seluruh intervensi ini dirangkai untuk memastikan bahwa negara hadir secara utuh sebagai benteng pelindung di setiap aspek kehidupan dasar masyarakat.

Hunian Layak Bagi Rakyat:
Perbaikan 400 Ribu Rumah dan Saluran 500 Ribu Genteng

Rumah adalah benteng pertahanan terdepan sebuah keluarga. Tempat berteduh yang aman dan sehat menjadi syarat mutlak bagi lahirnya generasi yang kuat, produktif, dan bermartabat. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak keluarga kurang mampu di berbagai penjuru Nusantara yang harus tinggal di bawah

atap bocor, berdinding rapuh, dan berlantai tanah *(Kompas, 12 Maret 2026)*.

Menjawab tantangan kebutuhan hunian dasar tersebut, pemerintah mengakselerasi Program Pembangunan dan Perbaikan Hunian Rakyat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP). Dalam kurun waktu berjalan, program ini telah merehabilitasi secara masif lebih dari 400 ribu Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kawasan perdesaan maupun kantong-kantong permukiman padat perkotaan *(Detikcom, 18 Juni 2026)*. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas proteksi hunian warga, pemerintah menyalurkan bantuan material langsung berupa 500 ribu genteng dan atap standar berkualitas bagi rumah-rumah warga kurang mampu di berbagai daerah *(Antara News, 22 Agustus 2026)*.



Program pembenahan dan bedah rumah tidak layak huni yang dilaksanakan secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Sumber Foto: Ketik.com / Kementerian Perumahan Rakyat, 2025)

Pendekatan perbaikan hunian ini dirancang dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan padat karya masyarakat. Setiap unit rumah mendapatkan penanganan cakupan struktur bangunan, lantai, pencahayaan, sanitasi, serta perbaikan atap secara menyeluruh *(InfoPublik, 5 September 2026)*. Keterlibatan warga lokal dalam proses pengerjaan tidak hanya mempercepat proses

rehabilitasi fisik, tetapi juga menggerakkan perekonomian desa melalui penyerapan tenaga kerja sekitar.

Program perbaikan 400 ribu rumah dan pembagian 500 ribu genteng ini mempertegas menghadirkan keadilan sosial hingga ke ruang-ruang paling privat masyarakat. Negara memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang dan lokasi geografisnya, berhak menikmati hangatnya rumah berteduh yang layak, aman, dan sehat.

Kesetaraan Layanan Kesehatan:
Kenaikan Anggaran BPJS Rp20 Triliun Tanpa Beda Kelas

Kesehatan adalah hak mendasar setiap warga negara yang tidak boleh disekat oleh status sosial maupun tingkat ekonomi. Namun, selama bertahun-tahun, sistem penjenjangan kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan kerap menciptakan diskriminasi kualitas ruang rawat inap serta diskriminasi antrean pelayanan medis di fasilitas kesehatan *(Kompas, 14 Mei 2024)*.

Mengakhiri dikotomi kelas dalam pelayanan kesehatan publik tersebut, pemerintah secara bertahap menghapus kualifikasi kelas 1, 2, dan 3 dan menggantikannya dengan penerapan tunggal Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) *(Detikcom, 28 Mei 2026)*. Untuk menopang kesiapan infrastruktur serta menjamin kualitas layanan KRIS di seluruh rumah sakit mitra, pemerintah menyuntikkan tambahan alokasi anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun dari APBN *(Antara News, 11 Juli 2026)*.

Suntikan dana segar Rp20 triliun ini membiayai pemenuhan 12 standar kriteria KRIS di seluruh fasilitas kesehatan—mulai dari ketersediaan ventilasi, pembatas antar-tempat tidur yang memadai, pencahayaan, standar kebersihan, hingga kepastian ketersediaan ruang inap *(InfoPublik, 18 Agustus 2026)*. Dengan skema baru ini, seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta mandiri mendapatkan standar ruang perawatan dan perlakuan medis yang persis sama tanpa adanya pembeda kelas sosial.

Langkah berani ini menegaskan prinsip keadilan sosial di bidang kesehatan. Melalui penerapan KRIS yang ditopang anggaran yang memadai, negara memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan perawatan medis yang ramah, layak, dan setara saat bertaruh nyawa menghadapi penyakit.



Sumber Foto: CNBC Indonesia, 2024.

Deteksi Dini Kesehatan:
89 Juta Penerima Manfaat CKG

Paradigma pembangunan kesehatan nasional mengalami pergeseran fundamental—dari yang semula berfokus pada pengobatan penyakit (*kuratif*) menjadi pencegahan dan deteksi dini (*preventif*). Pendekatan ini terbukti jauh lebih efektif dalam menyelamatkan jiwa masyarakat sekaligus menekan beban pembiayaan medis BPJS Kesehatan di masa depan *(Kompas.com, 10 Februari 2025).*

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai kado ulang tahun dari negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga pertengahan 2026, pelaksanaan program CKG telah menjangkau lebih dari 89 juta penerima manfaat yang memanfaatkan layanan skreening kesehatan berkala di puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh Nusantara *(Antara News, 18 Juli 2026).* Layanan pemeriksaan kesehatan ini dirancang berdasarkan siklus hidup—mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia—dengan fokus pada deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga kanker *(Detikcom, 22 April 2026).*



Spanduk informasi dan suasana pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di fasilitas kesehatan masyarakat. (Sumber Foto: Antara Foto / Kementerian Kesehatan RI, 2025)

Sistem pelaksanaan CKG diintegrasikan dengan aplikasi kesehatan nasional SATUSEHAT, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri serta memantau rekam medis hasil skrining langsung melalui gawai mereka *(InfoPublik, 5 Juni 2026)*. Penanganan dan intervensi medis dini yang ditemukan saat CKG dapat langsung dirujuk ke faskes tingkat lanjut tanpa membebani biaya warga.

Melalui penjangkauan 89 juta warga ini, CKG terbukti menjadi gerakan kesehatan publik berskala masif. Negara hadir tidak hanya di saat rakyatnya jatuh sakit, tetapi hadir secara proaktif menjaga kesehatan setiap individu agar tetap produktif dan berdaya saing.

Menjaga Daya Beli:
Penahanan Harga BBM Subsidi, Listrik, dan Gas LPG 3 Kg

Fluktuasi harga energi global dan lonjakan inflasi dunia menjadi salah satu tantangan terbesar yang membayangi stabilitas ekonomi domestik. Kenaikan harga energi primer seperti BBM, listrik, dan gas LPG tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga secara langsung memicu kenaikan harga bahan pokok dan menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah *(Kompas, 16 April 2026)*.

Menghadapi risiko gejolak pasar global tersebut, pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk menahan tarif energi bersubsidi dan menjaga kepastian harga komoditas strategis bagi rakyat. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga lebih dari Rp300 triliun dari APBN guna memastikan tidak ada kenaikan harga untuk BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi, tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA hingga 900 VA, serta gas LPG 3 Kilogram *(Detikcom, 18 Mei 2026)*.

Kebijakan penahanan harga energi bersubsidi ini berfungsi sebagai peredam kejutan (*shock absorber*) utama yang melindungi sekitar 80 juta rumah tangga penerima manfaat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak inflasi *(Antara News, 12 Agustus 2026)*. Dengan terjaminnya harga energi harian, biaya logistik pangan dan pengeluaran rutin keluarga dapat terjaga secara konsisten.



Penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi yang harganya ditahan oleh pemerintah demi menjaga stabilitas pengeluaran dapur masyarakat. (Sumber Foto: Bloomberg Technoz / Pertamina, 2026)

Langkah ini membuktikan komitmen utuh negara dalam menempatkan perlindungan rakyat di atas segala fluktuasi pasar. Melalui stabilitas harga BBM, listrik, dan LPG 3 KG, pemerintah memastikan roda perekonomian kelas pekerja terus berputar tanpa rasa cemas akan lonjakan biaya hidup harian.

BAGIAN IV: BERDIKARI DI ATAS TANAH, ENERGI, DAN KEUANGAN SENDIRI

Kemandirian sebuah bangsa tidak dibangun di atas wacana, melainkan di atas penguasaan nyata atas sumber daya strategis, kedaulatan finansial, serta ketahanan pangan dan energi yang kokoh. Tanpa penguasaan atas aset-aset kunci, perekonomian sebuah negara akan selalu rentan terhadap tekanan luar dan fluktuasi geopolitik global.

Kedaulatan sejati menuntut keberanian untuk mengelola kekayaan nasional secara mandiri, mengarahkan investasi modal bagi kesejahteraan publik, serta memastikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bagian keempat ini merekam langkah-langkah konsolidasi fundamental dalam mewujudkan berdikari secara ekonomi dan keuangan. Fondasi baru ini diawali dengan pembentukan kelembagaan investasi strategis daya saing global melalui konsolidasi aset BUMN di bawah Daya Anagata Nusantara (Danantara). Konsolidasi modal ini beriringan dengan kebijakan penghapusan utang macet UMKM, petani, dan nelayan demi memulihkan akses permodalan dan menggairahkan kembali sektor riil di akar rumput.

Di bidang kedaulatan energi dan pangan, pemerintah memacu kemandirian nasional melalui akselerasi program mandatori biodisel B50 untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar, sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional melalui perluasan cetak sawah baru serta penguatan jaringan irigasi pertanian secara masif. Seluruh terobosan ini dirangkai untuk menegaskan satu pijakan kokoh: Indonesia mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri.

Benteng Pangan Mandiri:
Swasembada 8 Komoditas Pangan Utama

Ketergantungan terhadap impor pangan adalah celah kerentanan terbesar bagi kedaulatan sebuah bangsa. Di tengah ancaman krisis iklim global dan ketidakpastian rantai pasok dunia, kepastian ketersediaan pangan produksi dalam negeri bukan lagi sekadar pilihan ekonomi, melainkan benteng pertahanan nasional yang paling mendasar *(Kompas, 12 Januari 2026).*

Menjawab tantangan geopolitik dan kebutuhan konsumsi domestik, pemerintah menetapkan Peta Jalan Kedaulatan Pangan Nasional dengan target mencukupi kebutuhan secara mandiri (*swasembada*) pada delapan komoditas pangan utama: beras, jagung, kedelai, tebu/gula, daging sapi, bawang merah, cabai, dan minyak goreng *(Antara News, 18 April 2026)*. Strategi akselerasi ini memadukan ekstensifikasi lahan melalui cetak sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatra, serta intensifikasi pertanian lewat modernisasi mekanisasi, optimalisasi sistem irigasi, dan kepastian penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke petani *(Detik.com, 22 Mei 2026)*.



Peninjauan langsung kawasan sentra produksi pangan dan intensifikasi pertanian modern guna memastikan pencapaian target swasembada pangan nasional. (Sumber Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Merauke, 2024)

Melalui integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir, produksi beras nasional berhasil menembus surplus strategis yang memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog tanpa bergantung pada pasokan luar negeri *(Bisnis.com, 14 Juli 2026)*. Di saat yang sama, penguatan produktivitas jagung dan tebu secara konsisten mengurangi beban impor bahan baku pakan ternak dan industri gula

nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan riil para petani lokal *(InfoPublik, 5 September 2026)*.

Pencapaian swasembada pada delapan komoditas pangan utama ini menegaskan bahwa Indonesia mampu memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri. Kedaulatan pangan ini tidak hanya membentengi perekonomian nasional dari guncangan harga global, tetapi juga mengembalikan kehormatan Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Langkah Berani Transisi Energi:
Stop Impor Solar dan Ekspor Perdana Baterai EV

Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) fosil selama puluhan tahun tidak hanya menguras devisa negara, tetapi juga melestarikan kerentanan ekonomi nasional terhadap guncangan harga energi dunia. Di saat yang sama, melimpahnya cadangan nikel dan komoditas bahan mentah Indonesia kerap dijual murah tanpa memberikan nilai tambah optimal bagi kesejahteraan rakyat *(Kompas, 15 Januari 2026)*.

Menjawab tantangan ganda tersebut, pemerintah melancarkan dua terobosan strategis sekaligus: penghentian total impor solar melalui implementasi penuh mandatori Biodiesel B50 serta pelepasan ekspor perdana sel baterai kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) buatan dalam negeri *(CNBC Indonesia, 9 Juli 2026)*. Kebijakan mandatori B50—campuran 50% minyak sawit murni (CPO) dan 50% solar—secara resmi menghentikan pengimporan solar fosil dari luar negeri, sekaligus menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun *(Antara News, 12 Juli 2026)*.



Peluncuran resmi BBM Biodiesel B50 sebagai terobosan transisi energi nasional dalam menghentikan ketergantungan impor solar fosil. (Sumber Foto: CNBC Indonesia / CNBC Indonesia TV, 2026)

Beriringan dengan kemandirian BBM, rantai hilirisasi mineral Indonesia mencapai puncaknya melalui peresmian pabrik ekosistem baterai EV terpadu dan pengapalan perdana sel baterai kendaraan listrik ke pasar global *(Emiten News, 18 Agustus 2026)*. Indonesia berhasil bertransformasi dari sekadar eksportir bijih nikel mentah menjadi pemain utama rantai pasok industri kendaraan masa depan di tingkat dunia.

Penghentian impor solar dan pengapalan perdana baterai EV ini menandai era baru kedaulatan energi serta industrialisasi Indonesia. Negara tidak lagi menjadi penonton dalam konstelasi ekonomi global, melainkan berdiri tegak sebagai produsen energi hijau dan pusat industri teknologi maju yang memperkuat posisi geopolitik bangsa.

Merdeka dari Beban Masa Lalu:
Pelunasan Utang Krisis 1997–1998

Krisis Moneter 1997–1998 meninggalkan luka fiskal yang sangat dalam bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Selama hampir tiga dekade, APBN harus menanggung beban bunga dan kewajiban surat utang masa lalu—termasuk sisa Surat Berharga Negara (SBN) serta instrumen kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)—



Sumber Foto: Katadata/ Kementerian Keuangan RI, 2024

yang terus membebani ruang gerak belanja pembangunan nasional *(Kompas, 14 Februari 2026)*.

Menuntaskan warisan beban masa lalu tersebut, pemerintah menetapkan strategi konsolidasi fiskal yang disiplin dan agresif untuk menyelesaikan pembayaran sisa kewajiban pokok serta bunga utang krisis 1997–1998 secara bertahap hingga tuntas *(Katadata, 20 Juni 2024)*. Melalui porsi efisiensi anggaran belanja non-prioritas, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan manajemen utang yang prudent, negara berhasil menutup lembaran masa lalu dan membebaskan APBN dari beban sejarah kewajiban finansial krisis perbankan akhir abad ke-20 *(Antara News, 10 Agustus 2026)*.

Selesainya pembayaran kewajiban masa lalu ini secara signifikan memperluas ruang fiskal (*fiscal space*) APBN nasional. Dana triliunan rupiah yang sebelumnya terserap untuk membayar beban masa lalu kini dialihkan secara utuh untuk membiayai belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat—seperti infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sekolah, kesehatan masyarakat, hingga insentif ekonomi riil *(Kemenkeu RI, 2026)*.

Langkah penuntasan utang sejarah ini menegaskan kemerdekaan fiskal Indonesia yang sesungguhnya. Dengan terbebas dari jerat warisan krisis masa lalu, bangsa Indonesia kini memiliki fondasi keuangan negara yang jauh lebih sehat, mandiri, dan berdaya tahan tinggi dalam menyongsong masa depan ekonomi nasional.

BAGIAN V: BENTENG KEDAULATAN DAN KEBANGGAAN BANGSA

Kemerdekaan dan kemajuan ekonomi yang telah diraih suatu bangsa tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya sistem pertahanan yang tangguh, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehormatan diplomasi di panggung internasional. Kedaulatan wilayah, keamanan warga negara, dan wibawa di mata dunia adalah perisai utama yang menjamin keberlanjutan seluruh capaian pembangunan nasional.

Sebuah bangsa besar harus mampu menjaga setiap jengkal tanah, air, dan udara wilayahnya dari segala bentuk ancaman luar maupun dinamika kejahatan transnasional. Di saat yang sama, komitmen pemberantasan korupsi, penataan birokrasi, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan pilar legitimasi negara.

Bagian kelima sekaligus penutup dari rekam jejak kebijakan ini memperlihatkan pemenuhan komitmen strategis Indonesia dalam memperkuat benteng kedaulatan dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa yang merdeka. Komitmen ini diwujudkan secara nyata melalui modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara masif, penguatan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, hingga langkah berani menindak tegas praktik korupsi, judi online, serta kejahatan keuangan yang menggerus ekonomi rakyat.

Di panggung diplomasi global, Indonesia semakin memantapkan peran kepemimpinannya melalui diplomasi aktif, kontribusi perdamaian dunia, serta penegasan posisi geopolitik yang independen dan bermartabat. Seluruh capaian ini melengkapi ikhtiar pembangunan nasional—memastikan bahwa Indonesia tidak hanya sejahtera dan mandiri di dalam negeri, tetapi juga disegani, dihormati, dan menjadi kebanggaan seluruh rakyatnya di mata dunia.

Menjaga Samudra Nusantara: Kehadiran Kapal Induk Pertama di ASEAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108 ribu kilometer dan jalur pelayaran strategis global, Indonesia memiliki tanggung jawab geopolitik yang amat besar dalam menjaga keamanan maritim. Potensi ancaman

navigasi, kejahatan lintas negara, hingga kebutuhan penanggulangan bencana alam secara cepat di ribuan pulau menuntut hadirnya armada pertahanan laut berdaya jangkau luas dan berkemampuan mobilitas tinggi *(Kompas, 12 Februari 2026)*.

Menjawab kebutuhan strategis tersebut, pemerintah memperkuat jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan menyiapkan serta merealisasikan akuisisi kapal induk helikopter (*Landing Helicopter Dock/LHD*) Giuseppe Garibaldi *(Kompas.id, 24 Februari 2026)*. Kehadiran kapal induk ini tidak hanya menandai tonggak sejarah baru sebagai pengoperasian kapal induk helikopter pertama di kawasan Asia Tenggara oleh Indonesia, tetapi juga meningkatkan secara drastis kapabilitas penyeimbangan kekuatan (*power projection*) maritim nasional di wilayah Samudra Hindia dan Pasifik *(CNA Bahasa, 20 Februari 2026)*.



Kapal induk helikopter Giuseppe Garibaldi yang memperkuat jajaran armada maritim TNI AL sebagai pangkalan operasi pertahanan dan penanggulangan bencana. (Sumber Foto: CNA Bahasa / Italian Navy, 2026)

Kapal induk helikopter ini difungsikan sebagai pangkalan maritim bergerak (*floating naval base*) yang Mampu mengangkut belasan helikopter angkut berat dan serbu, kendaraan amfibi, serta unit medis darurat berskala rumah sakit terapung *(Detikcom, 15 Maret 2026)*. Selain untuk menjaga kedaulatan laut dan pengawalan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), kapal ini menjadi aset vital dalam

misi kemanusiaan serta operasi penanggulangan bencana alam (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR*) di seluruh pelosok Nusantara.

Kehadiran kapal induk helikopter pertama ini mempertegas kembali posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang disegani. Indonesia tidak hanya menjaga wilayah perairannya sendiri, tetapi juga tampil sebagai benteng penjamin stabilitas, keamanan, dan kedamaian di kawasan Asia Tenggara.

Nadir Pembangunan Daerah:
3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air bagi Pelosok

Pembangunan nasional sering kali terfokus pada megaproyek di perkotaan, sementara warga di pelosok dan wilayah terpencil masih bertaruh nyawa menyeberangi sungai demi bersekolah atau kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan hidup harian. Ketimpangan akses infrastruktur dasar ini merupakan ketidakadilan yang harus segera diakhiri demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan *(Kompas, 18 Mei 2026).*

Menjawab keprihatinan tersebut, pemerintah melancarkan operasi bakti infrastruktur kerakyatan secara masif dengan melibatkan jajaran TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Melalui program ini, pemerintah meresmikan dan membangun sebanyak 3.395 jembatan perdesaan serta meresmikan 3.000 titik sumber air bersih berbasis sumur bor dan pipanisasi di wilayah pelosok, daerah terisolasi, hingga kawasan perbatasan *(Antara News, 13 Agustus 2026).*

Pembangunan 3.395 jembatan—yang didominasi jembatan gantung dan jembatan penghubung antar-desa—secara langsung menghubungkan kembali jalur distribusi hasil pertanian warga dan menjamin keamanan akses pendidikan anak-anak sekolah *(InfoPublik, 20 Agustus 2026).* Sementara itu, penyediaan 3.000 titik sumber air bersih memberikan solusi konkret mengatasi kekeringan kronis serta membebaskan ratusan ribu keluarga di daerah terpencil dari krisis air bersih.



Pembangunan ribuan jembatan gantung dan perdesaan membuka akses aman bagi anak-anak sekolah dan mobilitas ekonomi warga desa. (Sumber Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden, 2026)

Hadirnya infrastruktur vital di tingkat akar rumput ini membuktikan bahwa negara benar-benar hadir hingga ke jengkal tanah paling luar. Pembangunan tidak lagi diukur dari kemewahan pusat kota, melainkan dari hadirnya rasa aman, kemudahan hidup, dan senyum anak-anak di pelosok Nusantara.

Reformasi Pelayanan Haji:
Pemangkasan Antrean dari 49 Tahun Menjadi 14 Tahun

Menunaikan ibadah haji adalah impian tertinggi bagi puluhan juta umat Islam di Indonesia. Namun, selama bertahun-tahun, calon jemaah harus dihadapkan pada ketidakpastian akibat membengkaknya masa tunggu pendaftaran. Di beberapa kabupaten dan kota, daftar tunggu (*waiting list*) bahkan sempat menyentuh angka ekstrem hingga 49 tahun—sebuah durasi yang melampaui usia produktif dan memadamkan harapan banyak lansia untuk berangkat ke Tanah Suci *(Detikcom, 8 April 2026)*.

Menanggapi keluhan mendalam masyarakat tersebut, pemerintah melakukan reformasi tata kelola haji secara menyeluruh dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta

melancarkan pembersihan data calon jemaah secara komprehensif *(Tirto.id, 28 September 2026)*. Melalui pembenahan sistem digital pendaftaran, pembersihan lebih dari 400 ribu data invalid dan pendaftar ganda, serta penataan ulang alokasi kuota nasional berbasis validasi riil, pemerintah berhasil memangkas masa antrean faktual keberangkatan haji Indonesia secara drastis—dari yang semula mencapai 49 tahun menjadi rata-rata 14 tahun *(Setneg.go.id, 28 September 2026)*.



Interaksi langsung Presiden dengan para jemaah haji lansia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan, kenyamanan, dan kepastian ibadah. (Sumber Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Kementerian Agama RI, 2025)

Langkah pemangkasan antrean ini diikuti dengan penataan rantai pasok pelayanan haji di Arab Saudi, termasuk pemberantasan praktik kartel dan mafia kuota haji, transparansi penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta peningkatan standar akomodasi dan katering bagi jemaah di Makkah dan Madinah *(DetikNews, 28 September 2026)*. Pembenahan ini memastikan bahwa calon jemaah mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan yang akurat tanpa rasa cemas akan permainan kuota.

Keberhasilan memangkas antrean haji hingga rata-rata 14 tahun ini merupakan bentuk nyata komitmen pelayanan negara terhadap pemenuhan hak beribadah rakyatnya. Negara tidak hanya hadir memfasilitasi keberangkatan, tetapi juga menghadirkan

keadilan, kepastian, dan kemuliaan bagi seluruh calon tamu Allah dari Indonesia.

Panggung Kehormatan Nusantara:
Juara FIFA ASEAN Cup dan 5 Emas Asian Games

Olahraga bukan sekadar gelanggang kompetisi fisik, melainkan simbol martabat, persatuan, dan kebanggaan nasional suatu bangsa. Keberhasilan mencetak prestasi di arena internasional menjadi pemantik rasa percaya diri kolektif seluruh rakyat, mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan utama yang patut diperhitungkan di tingkat regional maupun Asia *(Kompas, 6 Oktober 2026)*.

Melalui pembinaan atlet yang berkelanjutan, modernisasi fasilitas olahraga, serta kepemimpinan manajemen keolahragaan yang profesional, Indonesia mengukir tinta emas sejarah baru di panggung dunia. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia berhasil keluar sebagai juara perdana turnamen resmi FIFA ASEAN Cup *(Kompas.com, 6 Oktober 2026)*. Di saat bersamaan, kontingen Merah Putih menorehkan prestasi gemilang pada panggung multievent terbesar benua Asia dengan membawa pulang 5 medali emas pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 *(Kemenpora, 25 September 2026)*.



Dukungan penuh pemerintah dan masyarakat di stadion dalam menyaksikan pencapaian bersejarah Timnas Indonesia di panggung internasional. (Sumber Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden, 2026)

Gelar juara FIFA ASEAN Cup mematahkan dahaga gelar juara sepak bola tingkat regional sekaligus mengukuhkan dominasi Garuda di Asia Tenggara *(Detikcom, 8 Oktober 2026)*. Sementara itu, raihan 5 medali emas Asian Games dari cabang-cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi membuktikan daya saing serta keunggulan talenta muda Indonesia di tingkat dunia *(Antara News, 28 September 2026)*.

Pencapaian di arena olahraga internasional ini membangkitkan kebanggaan nasional di seluruh pelosok Tanah Air. Prestasi Juara FIFA ASEAN Cup dan 5 emas Asian Games menjadi bukti nyata bahwa ketika anak-anak bangsa diberikan ruang, fasilitas, dan kepercayaan, Indonesia mampu berdiri sejajar sebagai juara di panggung dunia.

PENUTUP: MENERUSKAN GELOMBANG PERUBAHAN

Perjalanan dua tahun pembangunan nasional (2024–2026) yang terekam dalam lembaran-lembaran naskah ini bukanlah sekadar catatan angka dan deretan kebijakan di atas kertas. Ia adalah cermin dari denyut nadi peradaban bangsa yang sedang menata kembali arah masa depannya. Di bawah pijakan kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan kebanggaan nasional, Indonesia telah membuktikan bahwa perubahan fundamental bukanlah impian yang musnah di tengah jalan, melainkan kenyataan yang dapat diraih melalui keberanian politik dan kerja keras bersama.

Dari pemenuhan hak-hak dasar rakyat—seperti gizi bagi anak-anak sekolah, rumah layak berteduh, kesetaraan akses kesehatan tanpa beda kelas, hingga kepastian harga energi—pemerintah telah meletakkan fondasi keadilan sosial yang kokoh. Di saat bersamaan, langkah berani melakukan konsolidasi modal nasional, kemandirian energi B50, swasembada pangan, hingga penuntasan beban utang sejarah krisis 1997–1998 mempertegas posisi Indonesia yang mandiri dan berdikari di atas tanahnya sendiri.

Gelombang perubahan ini semakin sempurna dengan berdirinya benteng pertahanan Nusantara yang modern, keadilan hukum bagi seluruh rakyat, serta hadirnya kembali kehormatan dan kebanggaan bangsa di gelanggang dunia. Pencapaian-pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa potensi Indonesia yang amat besar tidak lagi tidur, melainkan telah bangkit menuju era baru keemasan.

Namun, rekam jejak dua tahun ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan titik tolak bagi langkah-langkah besar berikutnya. Tugas seluruh komponen bangsa kini adalah menjaga, merawat, dan meneruskan gelombang perubahan ini agar tetap membakar semangat pembangunan hingga ke pelosok terluar Nusantara. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan disegani dunia, "Napas Baru Indonesia" akan terus dihembuskan bagi masa depan anak cucu kita.

GLOSARIUM

Berikut adalah daftar istilah teknis, singkatan, dan akronim penting yang digunakan dalam seluruh naskah buku *Napas Baru Indonesia:*

A – B

- **ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia):** Jalur laut yang ditetapkan bagi pelayaran dan penerbangan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas wilayah perairan Indonesia.
- **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- **ASEAN (Association of Southeast Asian Nations):** Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
- **B50 (Biodiesel 50):** Bahan bakar nabati hasil campuran 50% minyak kelapa sawit murni (*Crude Palm Oil/CPO*) dan 50% minyak solar fosil.
- **BBM:** Bahan Bakar Minyak.
- **BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia):** Skema bantuan tunai yang dikucurkan Bank Indonesia kepada perbankan nasional untuk mengatasi krisis likuiditas pada krisis moneter 1997–1998.
- **BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji):** Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
- **BPJS Kesehatan:** Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan, badan hukum publik yang bertugas menyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **BUMN:** Badan Usaha Milik Negara.

C – G

- **CBP (Cadangan Beras Pemerintah):** Persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah melalui Bulog

untuk menjaga stabilitas harga dan penanganan keadaan darurat.

- **CKG (Cek Kesehatan Gratis):** Program pelayanan kesehatan preventif dari pemerintah berupa pemeriksaan kesehatan berkala tanpa biaya bagi seluruh kelompok usia warga negara.
- **CPO (*Crude Palm Oil*):** Minyak kelapa sawit mentah hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit.
- **Danantara (Daya Anagata Nusantara):** Badan pengelola investasi strategis nasional yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset BUMN serta kekayaan negara.
- **EV (*Electric Vehicle*):** Kendaraan bermotor yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai penggeraknya.
- **FIFA (Fédération Internationale de Football Association):** Induk organisasi sepak bola internasional tertinggi di dunia.

H – P

- **HADR (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief*):** Misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam yang melibatkan unsur militer dan sipil.
- **KBLI (Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia):** Klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengelompokkan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia.
- **KemenPKP:** Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- **KemenPU:** Kementerian Pekerjaan Umum.
- **KRIS (Kelas Rawat Inap Standar):** Sistem pembakuan standar fasilitas dan kualitas ruang rawat inap peserta BPJS Kesehatan pengganti kategori Kelas 1, 2, dan 3.
- **LHD (*Landing Helicopter Dock*):** Kapal perang amfibi bernavigasi khusus yang dilengkapi landasan pacu helikopter serta dermaga dalam untuk meluncurkan kendaraan tempur amfibi.

- **LPG (*Liquefied Petroleum Gas*):** Gas minyak bumi yang dicairkan untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga dan industri.
- **PBI (Penerima Bantuan Iuran):** Peserta Jaminan Kesehatan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan penuh oleh pemerintah.

R – S

- **Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni):** Dinding, atap, dan lantai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luas bangunan.
- **SBN (Surat Berharga Negara):** Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membiayai APBN.
- **SATUSEHAT:** Platform integrasi dan pemantauan rekam medis digital kesehatan masyarakat Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- **TNI (Tentara Nasional Indonesia):** Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
- **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah):** Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di luar skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

Berikut adalah rujukan pemberitaan media massa nasional dan dokumen resmi (2024–2026) yang menjadi landasan penyusunan naskah buku *Napas Baru Indonesia*:

Media Cetak, Online, dan Lembaga Kantor Berita

- **Antara News.** (2025, 10 Februari). *Pemerintah Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Bagi Masyarakat*. Antara News.
- **Antara News.** (2026, 12 Juli). *Implementasi Mandatori B50 Berhasil Hentikan Total Impor Solar Fosil*. Antara News.
- **Antara News.** (2026, 18 Juli). *Kemenkes: Program CKG Telah Menjangkau 89 Juta Penerima Manfaat*. Antara News.
- **Antara News.** (2026, 10 Agustus). *Konsolidasi Fiskal APBN: Indonesia Tuntaskan Beban Kewajiban Utang Krisis 1997–1998*. Antara News.
- **Antara News.** (2026, 12 Agustus). *Subsidi Energi Rp300 Triliun Tahan Inflasi dan Lindungi Daya Beli 80 Juta Rumah Tangga*. Antara News.
- **Antara News.** (2026, 13 Agustus). *Presiden Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih di Pelosok Nusantara*. Antara News.
- **Antara News.** (2026, 22 Agustus). *Bantuan Material Perumahan: 500 Ribu Genteng Disalurkan untuk Rumah MBR*. Antara News.
- **Bisnis.com.** (2026, 14 Juli). *Surplus Beras Nasional Kuatkan Cadangan Beras Pemerintah Tanpa Impor*. Bisnis.com.
- **CNA Bahasa.** (2026, 20 Februari). *Prabowo Siapkan Kapal Induk Pertama RI Jadi Pangkalan Helikopter untuk Penanganan Bencana dan Pertahanan Maritim*. Channel NewsAsia Bahasa.
- **CNBC Indonesia.** (2026, 9 Juli). *Pertama di Dunia, BBM Biodiesel B50 Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto*. CNBC Indonesia.
- **Detikcom.** (2026, 8 April). *Kementerian Haji dan Umrah Tata Ulang Kuota: Masa Tunggu Haji Dipangkas Signifikan*. Detiknews.

- **Detikcom.** (2026, 22 April). *Skrining Kesehatan Preventif CKG Jangkau Anak hingga Lansia di Seluruh Indonesia*. Detikhealth.
- **Detikcom.** (2026, 28 Mei). *Penerapan KRIS Pengganti Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Berlaku Penuh*. Detikhealth.
- **Detikcom.** (2026, 18 Juni). *KemenPKP Tuntaskan Perbaikan 400 Ribu Rumah Tidak Layak Huni di Perdesaan*. Detikfinance.
- **Detikcom.** (2026, 6 Oktober). *Cetak Sejarah! Timnas Indonesia Sabet Gelar Juara Perdana FIFA ASEAN Cup*. Detiksport.
- **Emiten News.** (2026, 18 Agustus). *Prabowo Resmikan Proyek Hilirisasi Terpadu dan Ekspor Perdana Baterai EV*. Emiten News.
- **InfoPublik.** (2026, 5 Juni). *Platform SATUSEHAT Integrasikan Rekam Medis Digital Program Cek Kesehatan Gratis*. InfoPublik Kemenkominfo.
- **InfoPublik.** (2026, 18 Agustus). *Pemenuhan 12 Kriteria KRIS BPJS Kesehatan Didukung Suntikan Anggaran Rp20 Triliun*. InfoPublik Kemenkominfo.
- **InfoPublik.** (2026, 5 September). *Program Rutilahu dan Padat Karya Dorong Perekonomian dan Kualitas Hunian Desa*. InfoPublik Kemenkominfo.
- **Katadata.** (2024, 20 Juni). *Beban Utang Historis dan Strategi Pengelolaan Keuangan Negara yang Prudent*. Katadata.
- **Kompas.** (2024, 14 Mei). *Transformasi Layanan BPJS Kesehatan: Menghapus Penjenjangan Kelas Rawat Inap*. Kompas.
- **Kompas.** (2026, 12 Januari). *Peta Jalan Kedaulatan Pangan: Menuju Swasembada 8 Komoditas Utama*. Kompas.
- **Kompas.** (2026, 12 Februari). *Penguatan Armada Maritim dan Pengawalan Jalur ALKI Indonesia*. Kompas.
- **Kompas.** (2026, 12 Maret). *Tantangan Hunian Layak dan Akselerasi Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Kompas.
- **Kompas.** (2026, 16 April). *Peran APBN Sebagai Shock Absorber di Tengah Fluktuasi Energi Global*. Kompas.
- **Kompas.** (2026, 18 Mei). *Pembangunan Infrastruktur Akar Rumput: Menghubungkan Pelosok Nusantara*. Kompas.

- **Kompas.** (2026, 6 Oktober). *Kebangkitan Olahraga Nasional: Dominasi Asia Tenggara dan Prestasi Asian Games*. Kompas.
- **Tirto.id.** (2026, 28 September). *Pembersihan Data Invalid Pendaftaran Haji Berhasil Pangkas Masa Antrean Terlama*. Tirto.id.

Dokumen Resmi, Press Release, dan Laporan Pemerintah

- **Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.** (2024, 6 November). *Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto ke Merauke: Meninjau Panen Raya dan Lahan Cetak Sawah*. Komunikasipresiden.go.id.
- **Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.** (2026, 13 Agustus). *Presiden Prabowo Subianto Meresmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI-Polri*. Presidenri.go.id.
- **Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.** (2026, 6 Oktober). *Cetak Sejarah di Hadapan Presiden Prabowo, Indonesia Juara Perdana FIFA ASEAN Cup*. Presidenri.go.id.
- **Kementerian Agama Republik Indonesia.** (2025, 12 Mei). *Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia dan Komitmen Pelayanan Lansia*. Kemenag.go.id.
- **Kementerian Keuangan Republik Indonesia.** (2026, Mei). *Laporan Perkembangan APBN KITA dan Pengelolaan Strategi Kebijakan Fiskal*. Kemenkeu.go.id.
- **Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.** (2026, 25 September). *Apresiasi Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026*. Kemenpora.go.id.
- **Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.** (2026, 28 September). *Capaian Transformasi Tata Kelola Pelayanan Haji Indonesia 2024–2026*. Setneg.go.id.

TENTANG PENYUNTING

Tim Media Bamsoet merupakan unit kerja kreatif dan editorial strategis yang bertugas mengelola publikasi, dokumentasi jurnalistik, riset kebijakan publik, serta komunikasi media massa nasional. Beroperasi di bawah arahan dan gagasan pemikiran Dr. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.H, M.B.A. (Bamsoet)—tokoh senior pers, politisi, serta Anggota Wantimpres RI, sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20—tim ini secara konsisten menghimpun dan mengolah berbagai dinamika pembangunan, kebijakan strategis, serta isu-isu kebangsaan.

Dengan latar belakang kuat di bidang kewartawanan, analisis media, dan penyuntingan naskah berita, Tim Media Bamsoet memadukan pendekatan jurnalistik yang lugas dengan kedalaman perspektif kebangsaan. Melalui buku *Napas Baru Indonesia: Catatan Kedaulatan, Kesejahteraan Rakyat, dan Kebanggaan Bangsa (2024–2026)*, Tim Media Bamsoet menyajikan kompilasi naratif yang objektif, sistematis, dan komunikatif untuk merekam kerja-kerja nyata pemerintah serta dinamika kebangsaan demi memberikan pendidikan politik dan dokumen sejarah yang bermanfaat bagi publik.


Napas Baru
Indonesia
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan napas baru dengan berbagai pencapaian nyata yang langsung dirasakan rakyat. Dari olahraga, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kesejahteraan sosial, langkah-langkah berani dan berpihak pada rakyat telah membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih kuat, mandiri dan sejahtera.
Berbagai pencapaian Indonesia di era Presiden Prabowo:
1. Sejarah: Timnas Jadi juara FIFA ASEAN CUP
2. MBG: 62 juta penerima manfaat
3. Swasembada 8 komoditas pangan
4. 89 juta orang terma manfaat CKG
5. 400K rumah rakyat selesai diperbaiki
6. 182 sekolah rakyat dan 16 sekolah garuda sudah jalan
7. 71K sekolah diperbaiki di 2026
8. Pengurangan PPH 21 untuk pekerja dengan penghasilan dibawah 10 juta
9. Gaji guru PPPK/Honorer diambil pemerintah pusat
10. Batas potongan maksimal driver online 8%
11. Indonesia 5 emas di Asian Games
12. 48K siswa menjadi murid di sekolah rakyat (semua fasilitas gratis ditanggung negara)
13. Indonesia perdana ekspor batre kendaraan listrik
14. Indonesia sudah tidak lagi import solar
15. Prabowo memberikan subsidi upah 300K selama 3 bulan kepada 13,3 juta pekerja (Okt-Des)
16. 240K guru naik statusnya menjadi P3K penuh waktu (tanpa test)
17. Pemerintah menaikan anggaran BPJS 20 T, Prabowo mau tidak ada perbedaan antara pasien umum dan BPJS
18. 33 juta orang dapat bantuan 30 KG beras (Okt-Des 2026)
19. 500K genteng sudah disalurkan untuk memperbaiki rumah rakyat
20. Penerima KIP kuliah naik menjadi 1 juta mahasiswa, anggaran naik jadi 15,64T
21. Utang krisis 97-98 LUNAS
22. Antrian Haji dari 49 tahun menjadi 14 tahun ditambah negara kasih bantuan 3 juta untuk jemaah
23. Harga BBM subsidi tidak naik, Harga listrik tidak naik, Gas LPG 3 KG tidak naik
24. Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki kapal induk
25. 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air sudah dibangun
Self Publishing Media - 2026